

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN
HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan memperoleh Gelar
Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum UPN “Veteran” Jawa Timur



Oleh:

ACHMAD GIRI WARDANA
NPM:0871010020

YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2013

LEMBAR PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)

Di Susun Oleh :

Achmad Giri Wardana
NPM:0871010020

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,
Dosen Pembimbing

WIWIN YULIANINGSIH,SH.,M.Kn
NPT. 37507070225

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)

Disusun oleh :

ACHMAD GIRI WARDANA
NPM:0871010020

Telah direvisi dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 13 Juni 2013

Menyetujui,

Tim Penguji :

Tanda Tangan,

- | | |
|--|---------|
| 1. <u>SUBANI.,M.Si.</u>
NIP.19510504 198303 1 001 | (.....) |
| 2. <u>YANA INDAWATI,SH.,M.Kn.</u>
NPT. 37901070224 | (.....) |
| 3. <u>WIWIN YULIANINGSIH,SH.,M.Kn.</u>
NPT. 37507070225 | (.....) |

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM
(Studi Kasus Nomor 941/Pdt.P/2011/PA.Sby)

Disusun oleh :

ACHMAD GIRI WARDANA
NPM:0871010020

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada Tanggal 5 Juni 2013

Menyetujui,

Tim Penguji :

Tanda Tangan,

- | | |
|--|---------|
| 1. <u>SUBANI.,M.Si.</u>
NIP.19510504 198303 1 001 | (.....) |
| 2. <u>YANA INDAWATI,SH.,M.Kn.</u>
NPT. 37901070224 | (.....) |
| 3. <u>WIWIN YULIANINGSIH,SH.,M.Kn.</u>
NPT. 37507070225 | (.....) |

Mengetahui,
DEKAN

HARIYO SULISTIYANTORO,SH,MM
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Achmad Giri Wardana

Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya, 3 September 1988

NPM : 0871010020

Konsentrasi : Perdata

Alamat : JL. Hasan Wasi II/44-45 Waru Kepuh Permai

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya dengan judul :
“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM”
dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah benar-benar hasil karya saya sendiri, yang saya buat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan jiplakan (plagiat).

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini hasil jiplakan (plagiat) maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan dan dicabut gelar kesarjana (Sarjana Hukum) yang saya peroleh.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dengan penuh rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya.

Mengetahui,
Pembimbing

Surabaya, 5 Juni 2013
Penulis

WIWIN YULIANINGSIH,SH.,M.Kn.
NPT.37507070225

Achmad Giri Wardana
NPM:0871010020

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Puji syukur alhamdulillah dan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNYA, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul : “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM”. Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana berkat bantuan dan bimbingan para pihak yang terkait, adapun penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Haryo Sulistiyantoro S.H. M.M selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
2. Bapak Sutrisno S.H.,M.Hum selaku Wakil dekan I Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur dan juga sebagai Dosen Wali Penulis.
3. Drs.Ec.Bapak Gendut Soekarno M.S.selaku Wakil dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
4. Bapak Subani, S.H.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
5. Ibu Wiwin Yulianingsih SH.,M.Kn selaku Dosen Pembimbing menyusun skripsi ini.
6. Bapak dan ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

7. Bapak Drs.Sulaiman M.Hum selaku Ketua Majelis Pengadilan Agama Surabaya yang telah memberikan waktu untuk wawancara dengan penulis.
8. Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.
9. Kedua orang tuaku yang membantu mengerjakan skripsi ini.
10. Sahabat Terdekatku, Firdaus, Brilian Ardana Riswari, Andina Yulistya Prameswari, Sri Endang Kusdiarini (Reni), Tas’an, Pranita, Joko Wiratmono, Feby Ary Wibowo, Raditya Utama (Dito), Ulul, Frisko yang telah mendukung dan memberi motivasi pembuatan skripsi ini.
11. Adikku Mirqotul Aliah yang telah membantu mengerjakan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangannya untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin Ya Robbal ‘Alamin.

Surabaya, Juni 2013

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN REVISI SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAKSI.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Manfaat Penelitian.....	8
1.5. Kajian Pustaka.....	9
1.5.1. Pengertian Waris.....	9
1.5.2. Waris Menurut Hukum Islam.....	9
1.5.3. Rukun dan Syarat Waris Menurut Hukum Islam.....	10
1.5.4. Syarat-Syarat Waris.....	11
1.5.5. Pengertian Mewaris Menurut Hukum Islam.....	11
1.5.6. Pengertian Ahli Waris Menurut Hukum Islam.....	12
1.5.7. Pengertian Anak Cacat Mental.....	14

1.5.8. Arti Perlindungan.....	16
1.5.9. Pengertian Perlindungan Hukum.....	17
1.5.10. Jumlah Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam.....	17
1.5.11. Pengertian Pengampuan.....	19
1.5.12. Syarat-Syarat Menjadi Wali Menurut Hukum Islam.....	21
1.5.13. Berakhirnya Perwalian.....	23
1.6. Metodologi Penelitian.....	24
1.6.1. Pendekatan Masalah.....	24
1.6.2. Sumber Bahan Hukum dan Data.....	25
1.6.2.1. Sumber Bahan Data Hukum Primer.....	25
1.6.2.2. Sumber Bahan Data Hukum Sekunder.....	25
1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan dan atau/Data.....	26
1.6.4. Metode Analisis Data.....	26
1.6.5. Waktu Penelitian.....	27
1.6.6. Lokasi Penelitian.....	27
1.6.7. Sistematika Penulisan.....	27

BAB II PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL

DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT HUKUM ISLAM

2.1. Anak Yang Menyandang Cacat Mental.....	30
2.2. Perlindungan Hukum Bagi Anak Cacat Mental.....	32
2.2.1. Perlindungan Anak Cacat Mental dari Keluarga.....	33

2.2.2. Perlindungan Hukum Untuk Anak Cacat Mental Oleh Masyarakat.....	35
2.2.3. Perlindungan Hukum Oleh Negara Terhadap Anak Cacat Mental.....	39
2.2.4. Bagian Waris Yang diterima Anak Cacat Mental.....	43
2.2.5. Pembagian Waris Menurut Al-Qur'an.....	47
BAB III PIHAK-PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB ATAS HARTA WARIS ANAK CACAT MENTAL	
3.1. Pihak Yang Bertanggung Jawab Atas Harta Waris Anak Cacat Mental.....	59
3.2. Masa Berlakunya Perwalian Dalam Hukum Islam.....	63
BAB IV PENUTUP.....	67
4.1. Kesimpulan.....	67
4.2. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA
TIMUR FAKULTAS HUKUM

Nama Mahasiswa : Achmad Giri Wardana
NPM : 0871010020
Tempat Tanggal Lahir : Surabaya, 3 September 1988
Program Studi : Strata 1 (S1)
Judul Skripsi :

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK CACAT MENTAL DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARIS DITINJAU DARI HUKUM WARIS ISLAM

ABSTRAKSI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris islam. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu dengan wawancara atau mendapatkan data yang lebih akurat yang berhubungan dengan judul tersebut, sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur, karya tulis ilmiah dan perundang-undangan yang berlaku. Dari hasil penelitian di Pengadilan Agama yang memutuskan permohonan sebagai ahli waris dari anak cacat mental, menunjukkan bahwa Negara melindungi hak-hak anak cacat mental melalui jalur hukum. Karena anak cacat mental tidak dapat melakukan perbuatan hukum dalam menerima pembagian warisan maka perlu adanya pendamping atau wali yang mengurus pribadi anak serta hartanya, sehingga harta waris tersebut dapat digunakan untuk keperluan si anak. Apabila wali dalam mengurus anak cacat mental telah menyalahgunakan hak dan wewenangnya maka pengadilan dapat mencabut hak perwaliannya dan menggantinya kepada pihak lain. Dengan adanya harta waris tersebut dapat dipakai sebagai modal untuk menggali bakat anak supaya anak cacat mental tersebut menjadi anak yang berpotensi dan berprestasi.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak Cacat Mental, Hukum Waris Islam

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menjamin kepastian, dan perlindungan hukum yang bertitik berat pada kebenaran dan keadilan. Hal ini berarti bahwa segala sesuatunya harus berdasarkan pada hukum yang berlaku di negara RI.

Didalam masyarakat manusia hidup saling berpasang-pasangan dengan tujuan agar manusia itu merasa tentram dan nyaman untuk mendapatkan keturunan demi kelangsungan hidup, untuk mencapai tujuan tersebut manusia membentuk sebuah lembaga perkawinan. Di Indonesia perkawinan merupakan suatu yang sakral dan agung, dengan adanya perkawinan tersebut diharapkan dapat membentuk suatu keluarga yang sejahtera. Keluarga adalah merupakan bagian yang terkecil dalam negara dimana dalam suatu keluarga terdiri dari ayah, ibu, anak. Didalam keluarga telah diatur apa yang disebut dengan hukum keluarga atau (*famili recht*) yang memuat antara lain :

- a. Perkawinan, perceraian beserta hubungan hukum yang timbul didalamnya seperti hukum harta kekayaan antara suami dan istri
- b. Hubungan hukum antara orang tua dan anak-anaknya atau kekuasaan orang tua (*ouderlijk macht*)
- c. Perwalian (*voogdijk*), dan

d. Pengampuan (curatele)¹

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan dilaksanakan dengan tujuan menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan memberikan rumah tangga yang damai dan perkawinan juga memiliki tujuan yang salah satunya adalah memiliki keturunan dengan maksud agar apabila seseorang meninggal dunia maka harta yang ditinggalkannya akan beralih kepada para ahli warisnya. Dengan adanya perkawinan maka muncul lah anak yang merupakan anugrah Tuhan Yang Maha Esa baik itu anak yang lahir normal maupun lahir dalam keadaan cacat mental atau fisik. Sudah semestinya kita memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Yang dimaksud anak cacat mental adalah merupakan gangguan perkembangan yang berat pada anak. Gejalanya sudah tampak sebelum anak mencapai usia tiga tahun. Perkembangan mereka menjadi terganggu terutama dalam komunikasi, interaksi dan perilaku².

Untuk tingkat kecerdasan anak ditentukan seacara metodik oleh IQ (Intellegentia Quotient), IQ untuk anak normal bisanya ditentukan antara 90–109, sedangkan untuk anak cacat mental IQ nya dibawah anak normal, adapun

¹ Yulies Tiena Masriani, Pengantar Hukum Indonesia, Penerbit, Sinar Grafika, Jakarta Juni 2004, hal.74

² Mirza Maulana, Anak Autis, Mendidik anak autis dan gangguan mental lain menuju anak cerdas dan sehat, Penerbit kata hati, Cetakan 1, Juli 2007, hal. 17

berbagai macam IQ diantaranya :

Genius.....	180
Gifted.....	140 – 179
Sangat superior.....	130 – 139
Superior.....	120 – 129
Pandai.....	110 – 119
Normal.....	90 – 109
Bodoh.....	80 – 89
Inferior.....	70 – 79
Moron.....	50 – 69
Embicile.....	20 – 49
Idiot.....	0 – 19 ³

Oleh karena itu anak cacat mental perlu mendapat perlindungan hukum karena anak cacat mental itu tidak dapat atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum. Dalam hal pembagian harta waris ditinjau dari hukum waris islam. anak cacat mental mempunyai hak yang sama dengan anak normal yaitu baik hak atas pembagian waris, hak atas perlakuan yang baik, hak atas kasih sayang dan hak-hak yang lain, sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Th. 2002 pasal 1 (12) yaitu hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara.

³ Mahmud 09- Kumpulan Makalah, Blogspot.com/2011/01/Intelligence – quotation – iq –html. diakses pada hari senin tanggal 5 Novembar 2012 pukul 22 :21 – 22.30 WIB

Berbicara tentang hukum waris, hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian, akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris⁴.

Arti waris, waris dalam bahasa Indonesia disebut pusaka yaitu harta benda dan hak yang ditinggalkan oleh orang yang mati untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya. Pembagian itu lazim disebut faraidl, artinya menurut syara' ialah pembagian pusaka bagi yang berhak menerimanya⁵.

Pengertian hukum waris menurut Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H. Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia. Dengan lain perkataan mengatur peralihan hak harta kekayaan yang ditinggalkan pewaris yang meninggal dunia. serta akibat hukumnya bagi ahli waris⁶.

⁴ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia, Penerbit refika aditama, Bandung, Maret 1985, hal.1

⁵ Moh. Rifa'i, Ilmu Feqih Islam Lengkap, Penerbit, CV. Toha Putra Semarang, Mei 1978 hal.513

⁶ Henny Tanuwidjaja, Hukum Waris Menurut BW, Penerbit Refika Aditama, cetakan kesatu, Maret 2012

Menurut Prof Dr. R. Wirjono Prodjodikoro S.H, memberikan batasan-

batasan mengenai warisan, antara lain :

1. Seorang yang meninggalkan warisan (Elflater) pada saat orang tersebut meninggal dunia.
2. Seorang atau beberapa orang ahli waris (Erfenaar), yang mempunyai hak menerima kekayaan yang ditinggalkannya itu.
3. Harta warisan (nederlanden schap), yaitu kekayaan yang ditinggalkan dan selalu beralih kepada para ahli waris tersebut⁷.

Untuk melindungi anak cacat mental dalam hal mendapatkan harta waris dari orang tuanya diperlukan seorang yang dipercaya dan bertanggung jawab atas harta peninggalannya agar harta tersebut menjadi aman dan selamat untuk keperluan dan kebutuhan anak tersebut sampai mandiri dan sampai akhir hayatnya, kalau tidak ada orang yang bertanggung jawab atas harta peninggalannya dikhawatirkan harta waris tersebut akan dimiliki atau lebih bahaya lagi apabila dijual oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, padahal secara hukum harta waris tersebut keseluruhannya milik anak cacat mental ini.

Yang menjadi masalah mengapa penulis meneliti masalah ini, karena banyak orang tua yang merasa malu mempunyai anak cacat mental dan tidak memperhatikan hak-haknya. Misalnya anak cacat mental tersebut dikurung di rumah (tidak dikeluarkan) supaya orang tua tidak malu maka anak cacat mental tersebut agar disekolahkan di SLB (Sekolah Luar Biasa) atau sekolah lain yang sejenis yang mengajarkan keterampilan-keterampilan atau olah raga yang

⁷ Oemarsalim, Dasar-Dasar Hukum Waris di Indonesia, Penerbit Rineka Cipta, Februari 2006, hal.4

disesuaikan dengan kemampuan anak cacat mental tersebut, supaya anak cacat mental tersebut bisa beradaptasi dengan teman-temannya.

Alasan ini sangat penting untuk diteliti karena menyangkut hak anak cacat mental supaya mendapat perlindungan hukum yang layak hidup seperti anak-anak normal biasanya, hanya saja anak cacat mental ini sulit untuk bergaul dengan masyarakat lingkungan anak normal (anak cacat mental sering digoda).

Misalnya, anak cacat mental tersebut ingin bergaul dengan anak normal tetapi sering terjadi anak cacat mental ini diperlakukan untuk berbuat negatif, seperti diberi minum-minuman yang beralkohol dan perbuatan lain yang tercela, sehingga anak tersebut sampai mabuk, setelah kejadian ini orang tua tidak tahu harus melapor kemana. Ini berarti anak tersebut tidak mendapat perlakuan yang baik dari lingkungannya, oleh karena itu orang tua mengurung anak tersebut untuk tidak keluar. Meskipun didalam Undang-Undang perlindungan anak, (UU RI No. 23 Th 2002) pasal 13 (1) menyebutkan : Setiap anak selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhannya, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a. Diskrimansi
- b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
- c. Pelantaran
- d. Kekejaman, kekerasan, penganiayaan
- e. Ketidak adilan
- f. Perlakuan salah lainnya

Meskipun ada pasal yang menyatakan perlindungan anak akan tetapi pasal tersebut belum memasyarakat artinya masih banyak orang tua yang belum tahu atau belum mengerti adanya pasal tersebut apalagi bagi mereka yang tidak mengerti tentang hukum.

Penulis membahas masalah perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian waris supaya tidak jatuh ketangan orang yang tidak bertanggung jawab perlu adanya peraturan perundang-undangan yang ditinjau dari hukum waris islam.

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian waris menurut hukum waris islam?
2. Siapa yang bertanggung jawab atas harta waris anak cacat mental menurut hukum waris islam?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian harta waris menurut hukum waris islam yang ada pada kasus di PA yaitu sepasang suami istri yang telah meninggal dunia mempunyai lima orang anak. anak yang pertama meninggal dunia, anak yang kedua meninggal dunia, anak yang ketiga meninggal dunia dan mempunyai anak seorang yang masih hidup dalam keadaan cacat mental,

anak yang keempat masih hidup, anak kelima masih hidup. Paman dari anak cacat mental tersebut mengajukan permohonan ke PA untuk menjadi wali dari anak cacat mental, PA mengabulkan permohonan paman dari anak cacat mental tersebut untuk menjadi wali anak cacat mental. agar dapat mengurus diri anak cacat mental (keponakannya) dan untuk mengurus bagian waris dalam pembagian warisan supaya hak dan jumlah bagian warisan anak cacat mental tidak jatuh ketangan orang lain dan diketahui jumlah bagiannya secara pasti.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Anak cacat mental harus mendapatkan payung hukum dari pemerintah yang artinya anak tersebut benar-benar mendapat haknya dan mendapat perlindungan hukum, apabila anak tersebut mendapat perlakuan yang tidak sesuai dengan kriteria hukum, misalnya : diterlantarkan, tidak mendapat haknya dengan baik dan harta anak tersebut dipakai untuk kepentingan pribadi maka bisa dikenakan sanksi hukum yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan saran dan masukan kepada pemerintah untuk meningkatkan Pengetahuan masyarakat tentang pentingnya perlindungan hak waris anak cacat mental berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang masalah yang terkait dengan penelitian ini dan memberikan manfaat bagi para pembaca.

1.5. Kajian Pustaka

1.5.1. Pengertian Waris

1.5.2. Waris Menurut Hukum Islam

Di dalam ayat suci Alqur'an yang berisi ketentuan hukum waris, sebagian besar terdapat pada surat An-Nisa (QS.IV:7) bagi orang laki-laki ada hak bagian harta peninggalan ibu-bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan bahwa laki-laki maupun perempuan merupakan ahli waris⁸.

Wujud warisan atau peninggalan menurut hukum Islam sangat berbeda dengan hukum waris barat sebagaimana diatur dalam KUHperdata maupun hukum waris adat. Warisan atau harta peninggalan menurut Islam yaitu sejumlah harta benda serta segala hak dari yang meninggal dunia dalam keadaan bersih artinya, harta peninggalan yang diwarisi oleh para ahli waris adalah sejumlah harta benda serta segala hak, setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris⁹.

Untuk memahami kaidah-kaidah seluk beluk hukum waris, hampir tidak dapat dihindarkan untuk terlebih dahulu memahami beberapa istilah yang lazim dijumpai dan dikenal. Istilah-istilah dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengertian hukum waris itu sendiri.

⁸ Eman Suparman, Hukum Waris Indonesia Perspektif Islam, adat, dan BW, Penerbit refika aditama, Bandung, Maret 1985 hal.11

⁹ ibid hal.13

Adapun pengertian lain dari waris didalam pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia istilah-istilah yang terdapat dalam kewarisan islam adalah sebagai berikut :

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) waris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalakan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusnya jenazah, pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

1.5.3. Rukun dan Syarat Waris Menurut Hukum Islam

Rukun Waris ada tiga :

1. Pewaris, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta waris
2. Ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, wala.
3. Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.

1.5.4. Syarat-Syarat Waris ada tiga :

1. Meninggalnya seseorang atau pewaris secara hakiki maupun hukum (misalnya dianggap telah meninggal). contohnya orang hilang yang keadannya tidak diketahui secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sebagai orang yang meninggal dunia.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. maksudnya, hak pemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.
3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing. Dalam hal ini posisi ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat dan sebagainya sehingga pembagi mengetahui dengan pasti jumlah bagian yang harus diberikan kepada masing-masing ahli waris, sebab dalam hukum waris perbedaan jauh dekatnya kerabat akan membedakan jumlah yang diterimanya¹⁰.

1.5.5. Pengertian Mewaris Menurut Hukum Islam

Mewaris menurut islam adalah mendapat bagian harta peninggalan menurut Al-qur'an yaitu :

- a. Karena hubungan darah, ditentukan secara jelas dalam (QS.An-nisa : 7, 11,12, 23 dan 176)

¹⁰ Beni Ahmad Saebani, Fiqh Mawaris, Penerbit CV. Pustaka Setia Bandung, Januari,2009,hal.129-131

- b. Hubungan semenda atau pernikahan
- c. Hubungan persaudaraan, karena agama yang ditentukan oleh Al-qur'an bagiannya tidak lebih dari sepertiga harta pewaris (QS.Al-Ahzab 6 :)¹¹.

1.5.6. Pengertian Ahli Waris Menurut Hukum Islam

Ahli waris menurut hukum islam adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal. Ahli waris ini dapat digolongkan menjadi dua yaitu ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan.

Ahli waris laki-laki ada 15 orang :

1. Anak laki-laki
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki (cucu) dari pihak anak laki-laki, dan terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki
3. Bapak
4. Kakek dari pihak bapak, dan terus keatas pertalian yang belum putus dari pihak bapak
5. Saudara laki-laki seibu seapak
6. Saudara laki-laki seapak saja
7. Saudara laki-laki seibu saja
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja
10. Saudara laki-laki seapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak

¹¹ Eman Suparman, Op cit, hal.16

11. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja
12. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak
13. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja
14. Suami
15. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat)

Jika 15 orang tersebut diatas semua ada, maka yang mendapat harta pusaka atau waris dari mereka itu hanya 3 orang saja yaitu :

- a. Bapak
- b. Anak laki-laki
- c. Suami

Ahli waris perempuan ada 10 orang :

1. Anak perempuan
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya kebawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki
3. Ibu
4. Ibu dari bapak
5. Ibu dari ibu terus keatas pihak ibu belum berselang laki-laki
6. Saudara perempuan yang seibu seapak
7. Saudara perempuan yang seapak
8. Saudara perempuan yang seibu
9. Istri
10. Perempuan yang memerdekakannya (mayat)

Jika 10 orang tersebut diatas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja yaitu :

- a. Istri
- b. Anak perempuan
- c. Anak perempuan dari anak laki-laki
- d. Ibu
- e. Saudara perempuan yang seibu seapak

Sekiranya 25 orang tersebut dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari suami istri, ibu, dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan¹².

Contoh ahli waris :

Sepasang suami istri yang telah meninggal dunia mempunyai 5 orang anak yang mana anak pertama meninggal dunia, anak kedua meninggal dunia anak ketiga meninggal dunia dan mempunyai seorang anak yang masih hidup. anak keempat dan kelima masih hidup. Anak keempat dan kelima ini beserta anak dari anak ketiga datang ke PA mohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris. Oleh PA permohonannya dikabulkan sebagai ahli waris.

1.5.7. Pengertian Anak Cacat Mental

Yang dimaksud anak cacat mental menurut Undang-Undang Perlindungan anak adalah (UU RI No. 23 Th 2002). Pasal 1 ayat 7 yang bunyinya : Anak yang menyandang cacat mental adalah anak yang

¹² id.shvoong.com/humanities/religion-studies/2051346-pengertian-ahli-waris/, diterbitkan tanggal 14 September 2010 diakses hari Kamis jam 22:43, Tanggal 22 November 2012

mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.

Yang dimaksud anak cacat mental disini adalah anak cacat mental yang memiliki IQ dibawah anak normal, yaitu memiliki IQ antara 20 – 49 – embilicile ini merupakan kelompok yang ringan, kelompok ini masih bisa diharapkan untuk mencapai IQ 50 – 69 – moron sedangkan IQ antara 0 – 19 – idiot kelompok ini merupakan kelompok berat ini tidak dapat disembuhkan oleh karena itu anak cacat mental ini perlu mendapat perlindungan hukum.

Pengertian umum anak cacat mental adalah suatu kondisi seseorang sejak lahir ataupun saat balita, yang membuat dirinya tidak dapat membentuk hubungan sosial atau komunikasi yang normal. Akibatnya, anak tersebut terisolasi dari manusia lain dan masuk dalam dunia repetitive, aktifitas dan minat yang obsesif. (Baron-Cohen, 1993).

Menurut Power (1989) karakteristik anak cacat mental terdapat 6 gangguan

Dalam bidang :

- interaksi sosial
- komunikasi (bahasa dan bicara)
- perilaku-emosi
- pola bermain
- gangguan sensorik dan motorik

-perkembangan terlambat atau tidak normal¹³.

Gejala – gejala diatas mulai tampak sejak lahir atau saat masih kecil, biasanya sebelum anak berusia 3 tahun.

1.5.8. Arti Perlindungan

Adalah tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi.....dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2004 adalah segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.

Sedangkan perlindungan yang tertuang dalam PP No. 2 Tahun 2002 adalah suatu bentuk layanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, kepada korban dan saksi ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun, yang diberikan tahap penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan.

Hukum menurut J.C.T Simorangkir, S.H. dan Sastropranoto S.H. adalah : Peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat badan-badan resmi yang berwajib.

¹³ joys.inspiration.blogspot.com/2011/02/pengertian-anak-cacat-mental-.html diakses hari rabu tanggal 27 februari 2013 jam 13.16

Hukum menurut R.Soeroso S.H. adalah himpunan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi yang melanggarnya.

Dari pengertian-pengertian tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan definisi perlindungan hukum.

1.5.9. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian¹⁴.

1.5.10. Jumlah Pembagian Harta Waris Berdasarkan Hukum Islam

Didalam surat An-nisa ayat 11 Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka) untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua anak perempuan¹⁵.

Seorang anak perempuan atau lebih, apabila bersama dengan anak laki-laki, maka pembagiannya dua berbanding satu (anak laki mendapat dua bagian

¹⁴ Julia Perez Kawain Lari, <http://blog.bestlagu.com/arti-perlindungan-hukum>, dikases hari jumat tanggal 7

Desember 2012, jam 14.02, Motivasi Pahlawan

¹⁵ Eman Suparman, Op cit, hal.11

dan anak perempuan mendapat satu bagian.

Di dalam KHI Bab III Pasal 176 disebutkan bahwa apabila anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Dari hasil wawancara dengan PA yaitu dengan bapak Sulaiman SH.M.HUM bahwa pembagian harta waris anak cacat mental sama dengan anak yang sehat (anak normal) tidak pandang batas usia dan pembagiannya bisa dibagi sendiri atau diselesaikan secara kekeluargaan kalau tidak mau akan digugat di Pengadilan Agama (Pasal 188 KHI) yang bunyinya :

Para ahli waris baik secara bersama-sama atau perseorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan.

Contoh : pembagian harta pusaka antara dua orang bersaudara (laki-laki dan perempuan) hendaklah tiap laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan satu bagian. Umpamanya anak perempuan hanya seorang satu orang dan anak laki-lakinya juga satu orang maka harta peninggalannya dibagi tiga bagian, dua bagian ($\frac{2}{3}$) untuk anak laki-laki dan satu bagian ($\frac{1}{3}$) untuk anak perempuan. Kalau anak laki-lakinya hanya seorang dan anak perempuan ada dua orang maka harta peninggalannya hendaknya dibagi empat bagian, ($\frac{2}{4}$) untuk anak laki-laki dan untuk anak perempuan mendapat $\frac{1}{4}$ bagian.

Di dalam kitab fiqh islam, yang mendapat $\frac{1}{4}$ bagian dari harta peninggalan adalah suami, apabila istrinya yang meninggal dunia itu meninggalkan anak, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan. Terdapat dalam firman Allah SWT (Surat An-Nisa : 12)¹⁶.

Yang mendapat $\frac{1}{8}$ bagian dari harta peninggalan adalah istri, apabila suaminya meninggal dunia, meninggalkan anak baik laki-laki maupun perempuan. Terdapat firman Allah SWT (Surat An-Nisa : 12)¹⁷.

1.5.11. Pengertian Pengampuan

Di dalam KUHperdata tidak ditemukan tentang pengampuan, di dalam pasal 433 KUHperdata hanya mengatur tentang siapa saja yang di maksud dibawah pengampuan adalah setiap orang dewasa yang dungu atau idiot, sakit otak atau gila sakit ingatan, mata gelap atau orang yang tidak dapat mengendalikan emosi, boros.

Menurut Vollmar pengampuan adalah keadaan yang disitu seseorang (curandus) karena sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap atau didalam segala hal tidak cakap untuk bertindak sendiri (pribadi) didalam lalu lintas hukum, atas dasar itu orang tersebut dengan keputusan hakim dimaksudkan dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak karenanya orang tersebut diberi wakil menurut Undang-Undang yaitu yang disebut pengampu (curator atau curatele)¹⁸.

Dari pengertian tersebut diatas bahwa pengampuan adalah perwalian terhadap kepentingan orang yang sudah dewasa tetapi tidak cakap

¹⁶ Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, Penerbit Sinar Algesindo, Bandung, Cet, ke 40, Thn 2007, hal.356

¹⁷ ibid, 357

¹⁸ Vollmar, H.F.A. Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid I, Grafindo Perdata Jakarta, Thn 1996, hal.180, Pdf

melakukan perbuatan hukum. akibat dimasukkannya seseorang di dalam pengampuan maka kedudukannya sama dengan orang belum dewasa. Ketentuan ini diatur dalam pasal 452 KUHperdata.

Yang dimaksud dibawah pengampuan adalah orang-orang yang tidak cakap bertindak atau anak-anak dibawah umur yang mendapat perwalian untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum atas nama orang-orang dan anak-anak tersebut.

Wali disini bertindak atas nama anak cacat mental dalam hal pembagian waris, jangan sampai anak cacat mental tersebut warisannya (bagiannya) dikurangi atau tidak mendapat bagian sehingga anak tersebut tidak mendapat apa-apa. Menurut ketua Mahkamah Syari'ah Banda Aceh, Drs. H. Abdul Mannan Hasyim S.H. M.H., mengatakan bahwa perwalian terhadap anak menurut hukum islam dan hukum positif ada 2 :

1. Perwalian terhadap diri pribadi anak dan
2. Perwalian terhadap bendanya

Perwalian terhadap diri pribadi anak adalah dalam bentuk mengurus pribadi diri anak, mulai dari mengasuh, ,memelihara, serta memberi pendidikan dan bimbingan agama. Pengaturan ini juga mencakup pemberian pengobatan bila si anak sakit dan pemenuhan segala kebutuhan hidup lainnya, semua pembiayaan hidup tersebut adalah menjadi tanggung jawab si wali. Perwalian terhadap harta bendanya adalah dalam bentuk mengelola harta benda si anak secara baik, termasuk mencatat jumlah hartanya ketika di mulai perwalian,

mencatat perubahan-perubahan hartanya selama perwalian, serta meyerahkan kembali kepada anak apabila telah selesai masa perwaliannya karena si anak telah dewasa dan maupun mengurus diri sendiri¹⁹.

Didalam pasal 107 – 112 Kompilas Hukum Islam (KHI) yang mengatur tentang perwalian dapat disimpulkan bahwa perwalian di definisikan sebagai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama anak yang orang tuanya meninggal dunia atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.

Di dalam Undang-Undang No. 23 Thn 2002 tentang Perlindungan Anak juga mengatur bahwa untuk kepentingan anak, wali wajib mengelola harta anak yang bersangkutan. (pasal 33 – 36 Undang-Undang Perlindungan Anak).

Menurut ketentuan hukum islam, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar seseorang dijadikan wali bagi anak-anak yang belum cukup umur atau tidak cakap bertindak secara hukum.

1.5.12. Syarat-Syarat Menjadi Wali Menurut Hukum Islam

1. Orang yang telah cukup umur dan berakal serta cakap bertindak hukum
2. Agama wali harus sama dengan agama anaknya
3. Memiliki sifat adil

¹⁹ Artikel Anda dan Hukum Keseharian -78

4. Mempunyai keamanan kemauan untuk bertindak dan memelihara amanah²⁰.

Menurut hukum islam menetapkan bahwa seorang yang paling berhak menjadi wali bagi kepentingan si anak adalah orang yang paling dekat dengan anak tersebut atau keluarganya bahkan tidak jarang pula dari anggota keluarga yang berhubungan kekerabatannya jauh, hal ini tergantung pada kesiapan dan kemampuan si wali untuk mengurus kepentingan anak tersebut.

Biasanya wali ini diberikan kepada saudara yang paling dekat yaitu apabila orang tuanya telah tiada maka anak tersebut ikut kakeknya, dan apabila kakeknya telah tiada maka anak tersebut ikut saudara laki-laki dan apabila saudara laki-laki tersebut tidak ada maka ikut anak dari saudara laki-laki, dan apabila anak dari saudara laki-laki tidak ada maka ikut pamannya, dan apabila pamannya tidak ada maka yang terakhir keputusan hakim.

Berdasarkan pasal 184 KHI : Bagi ahli waris yang belum dewasa atau tidak mampu melaksanakan hak dan kewajibannya, maka baginya diangkat wali berdasarkan putusan hakim atas usul anggota keluarga.

Dari hasil wawancara dengan PA dengan Bapak Sulaiman SH.M.Hum bahwa kalau ahli waris tidak cakap melakukan perbuatan hukum dapat ditunjuk seorang walinya yang terdekat yang ada hubungan dengan keluarga anak cacat mental dan dalam mengurus anak tersebut harus

²⁰
ibid

diperlakukan sama dengan anak yang sehat (anak normal).

Contoh Perwalian Di PA :

Sepasang suami istri mempunyai lima orang anak, anak pertama meninggal dunia, anak kedua meninggal dunia, anak ketiga meninggal dunia dengan meninggalkan seorang anak yang dalam kondisi keterlambatan mental atau cacat mental, sedangkan anak keempat dan anak kelima masih hidup. Anak yang keempat ini datang ke PA untuk mengajukan permohonan perwalian untuk ditetapkan sebagai wali dari anak yang mengalami cacat mental tersebut (adapun hubungan antara pemohon dengan anak cacat mental tersebut adalah sebagai keponakan). Untuk mengurus harta waris anak cacat mental ini. oleh PA permohonannya dikabulkan sebagai wali dari keponakannya yang mengalami cacat mental.

1.5.13. Berakhirnya Perwalian

Perwalian berakhir dapat ditinjau dua keadaan yaitu :

1. Dalam hubungan dengan keadaan si anak, dalam hal ini perwalian berakhir karena :
 - a. Si anak telah menjadi dewasa atau (minderjaringen)
 - b. Matinya si anak
 - c. Timbulnya kembali kekuasaan orang tuanya.
 - d. Pengesahan seorang anak diluar kawin yang diakui.
2. Dalam hubungan dan tugas wali, dalam hal ini perwalian berakhir karena :

- a. Ada pemecatan atau pembebasan atas diri si wali
- b. Ada alasan pembebasan dan pemecatan dari perwalian (pasal 380 KUHperdata)²¹.

Di dalam Pasal 109 KHI Pengadilan Agama dapat mencabut hak perwalian seseorang apabila wali tersebut pemabuk, penjudi, pemboros, melalaikan atau menyalahgunakan hak dan wewenangnya sebagai wali demi kepentingan orang yang berada di perwaliannya. Didalam Pasal 111 (1) KHI wali berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang di bawah perwaliannya apabila yang bersangkutan telah cukup dewasa atau telah menikah. Di dalam Pasal 111 (2) KHI apabila perwalian berakhir maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perselisihan antara wali dan orang yang berada di bawah perwaliannya tentang harta yang diserahkan kepada orang yang bersangkutan.

1.6. Metodologi Penelitian

1.6.1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yaitu menggunakan yuridis normatif adalah pendekatan kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistimatik hukum dan penelitian terhadap perbandingan hukum²².

²¹ [balianzahab.wordpress.com makalah-hukum-islam/perwalian-menurut-kuhperdata-2/](http://balianzahab.wordpress.com/makalah-hukum-islam/perwalian-menurut-kuhperdata-2/)

di akses tanggal 12 November 2012 hari senin jam 23.00

²² Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu tinjauan singkat, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, jakarta 1985 hal. 14

1.6.2. Sumber Bahan Hukum dan Data

1.6.2.1. Sumber bahan Data Hukum Primer

yaitu mengumpulkan bahan hukum primer berupa undang-undang perlindungan anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), Kitab Fiqh Islam, dan peraturan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

1.6.2.2. Sumber Bahan Data Hukum Sekunder

yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan sekunder meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan judul serta pendapat para pakar. Sumber bahan hukum sekunder adalah data dari penelitian kepustakaan dimana dalam sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan hukum tersier. Yang dimaksud bahan hukum tersier adalah merupakan bahan hukum sebagai penunjang dari kedua hukum yaitu primer dan sekunder. yang terdiri dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan kamus Inggris-Indonesia.

1.6.3. Metode Pengumpulan Bahan dan atau /Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) maka metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode dokumentasi yaitu dengan cara menggali data dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia beserta pelaksanaannya dan pendapat pakar dari ahli maupun buku-buku atau karya ilmiah yang lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

1.6.4. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan menganalisa, data, adapun metode analisa data dalam penelitian adalah menggunakan metode induksi atau deduksi yaitu cara berfikir dimana menarik kesimpulan yang bersifat umum dari beberapa kasus yang bersifat khusus disini akan terlihat bagaimana perundang-undangan yang ada disamping teory hukum dan prinsip-prinsip keislaman dijadikan alat untuk menarik kesimpulan. Dan mengungkapkan pendapat para pakar hukum dan tokoh agama atau ulama terlebih dahulu kemudian dibahas untuk selanjutnya diambil kesimpulan. Sedangkan analisis terhadap bahan hukum menggunakan deskriptif yaitu memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk memepertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru²³.

²³

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum Penerbit, Universitas Indonesia, (UI-Press), Jakarta, 2010,hal.10

1.6.5. Waktu Penelitian

Waktu penelitian adalah selama lima bulan di mulai pada bulan Agustus 2012 sampai Februari 2013, penelitian ini dilaksanakan pada bulan September. Tahap persiapan penelitian ini meliputi penentuan judul, penulisan proposal, seminar proposal, dan dilanjutkan dengan perbaikan proposal. Sedangkan tahap pelaksanaan penelitian selama lima bulan terhitung pertengahan september sampai bulan akhir januari 2013 meliputi pengumpulan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1.6.6. Lokasi Penelitian

Adalah tempat dimana penulis mengumpulkan data untuk menjawab masalah. Karena penulis menggunakan yuridis normatif maka lokasi yang dipilih adalah di Pengadilan Agama Surabaya Jl.Ketintang Madya VI No.3 Surabaya wawancara dengan Bapak Drs.Sulaiman M.Hum di mana tempat tersebut dipergunakan untuk meneliti,wawancara,mencari data atau keterangan dari Pengadilan Agama Surabaya untuk menjawab yang berhubungan dengan judul.

1.6.7. Sistimatika Penulisan

Sistimatika Penulisan dalam Skripsi ini agar supaya dapat memberikan gambaran uraian yang tepat dan teratur, maka Skripsi ini terbagi dalam 4 (empat) bab. Untuk lebih jelasnya gambaran mengenai Skripsi ini dapat dilihat pada Sistimatika yang antara lain sebagai berikut:

Bab Pertama, pada bab ini berisi Pendahuluan, yang mengawali seluruh rangkaian uraian dan pembahasan Skripsi yang penulis kaji, yang

mana pada bab pendahuluan ini berisikan tentang gambaran umum suatu permasalahan yang digunakan sebagai landasan berpijak dalam pembahasan pada bab-bab berikutnya. Penjabaran landasan berpijaknya pada permasalahan yang diawali dengan sub bab Latar Belakang dan Perumusan Masalah. Dengan latar belakang masalah akan kita ketahui tentang permasalahan yang dikaji, yang diletakan pada rumusan permasalahan. Pembahasan Skripsi ini sudah barang tentu ada yang diharapkan, yang akan dituangkan dalam tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Untuk menunjang agar hasil penelitian ini sesuai dengan yang diharapkan, maka diperlukan adanya Tinjauan Pustaka. Dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan dasar penyusunan karya ilmiah, maka akan disajikan tentang cara-cara penulisan ilmiah dalam Metode Penelitian, dengan harapan agar isi dari pada Skripsi dapat diketahui lebih awal sehingga diperlukan penyusunan secara sistematika. Untuk itu perlu disusun kerangka penyusunan yang dituangkan dalam Sistematika Penulisan.

Bab Kedua, merupakan jawaban dari rumusan masalah yang pertama yang menguraikan secara rinci tentang perlindungan hukum bagi anak cacat mental dalam pembagian waris menurut hukum islam. Yang mengemukakan landasan-lamdasan teory dengan menguraikan tentang pengertian anak cacat mental, perlindungan hukum bagi anak cacat mental, yang mana anak cacat mental mendapat perlindungan dari keluarga, perlindungan hukum anak cacat mental oleh masyarakat,

perlindungan hukum oleh negara terhadap anak cacat mental, akhirnya uraian tentang bagian waris yang diterima anak cacat mental dan pembagian waris menurut Al-Qur'an.

Bab Ketiga, merupakan uraian dari jawaban rumusan masalah yang kedua, yang akan menguraikan yang bertanggung jawab atas harta waris anak cacat mental menurut hukum islam. Pada bagian ini penulis mengungkapkan pihak-pihak yang bertanggung jawab atas harta waris anak cacat mental, yang kemudian dilanjutkan tentang masa berlakunya perwalian dalam hukum islam.

Bab Keempat, pada bab ini Penutup yang mengakhiri rangkaian uraian dan pembahasan, sub babnya terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

